

**TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR DI PUTRA UTAMA MOTOR SUKOHARJO**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat –Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Disusun Oleh :**

**AGUSTINA MAHARDIKA EKA**  
**C 100060034**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2010**

**BAB I**

**TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT**

**KENDARAAN BERMOTOR DI PUTRA UTAMA MOTOR SUKOHARJO**

**A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari dunia perdagangan, dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. Salah satu perjanjian itu adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga barang yang ingin dibelinya tersebut atau membayar secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga mengharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur.

Menyoroti jual beli angsuran atau kredit, pranata ini merupakan jawaban bagi calon pembeli yang tidak cukup dananya pada saat mereka membutuhkan sesuatu barang. Melalui pranata ini barang yang dibutuhkan dan hak milik atas barang tersebut dapat diperoleh sekaligus oleh konsumen, tanpa harus membayar harganya sekaligus. Pada saat pembayaran pertama, terjadi dua peristiwa secara bersama, secara de facto barang beralih dan secara de jure hak kepemilikan juga beralih.

Bahkan perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian kredit ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga kredit tersebut. Karena tidak di atur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).<sup>1</sup>

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan- persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD.

Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk.III titel 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk.III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.<sup>2</sup> Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1992

<sup>2</sup> Sri Gambir Melati , *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung*. Bandung : Alumni. 1999. Hal 3

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa. 1992, Hal 37

Dalam standard form contract pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayarannya, dimana hal ini pun bila dimungkinkan oleh penjual.

Mengenai perjanjian kredit tersebut dapat kita jumpai pada dunia perdagangan sepeda motor. Di dalam perdagangan sepeda motor, peristiwa kredit sering terjadi. Hal ini disebabkan karena harga sepeda motor yang relative mahal. Dalam hal ini sebagai jaminan bahwa pembeli tetap akan melunasi sisanya secara mengangsur, maka bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) belum diserahkan kepada pembeli. Selama harga belum dilunasi, maka pembeli tidak berhak memindahkan kepemilikan sepeda motor itu kepada pihak lain. Pembeli berhak untuk memindahkan kepemilikan sepeda motor setelah harga sepeda motor lunas dan BPKB telah diserahkan kepada pembeli.

Dalam kredit sepeda motor, sisa harga sepeda motor yang belum dibayar dapat dikenakan bunga tertentu, sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh pihak penjual, atas persetujuan pihak pembeli. Dalam perjanjian kredit ini sering halnya salah satu pihak melakukan wanprestasi, yang secara umum artinya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>4</sup> Dalam hal ini pembeli dapat melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar, tidak

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986, hal 60

membayar sama sekali, atau mengalihkan kepemilikan sepeda motor sebelum angsuran lunas, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit.

Semua yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sepeda motor ini menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hakim, agar pihak yang wanprestasi bertanggungjawab memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI PUTRA UTAMA MOTOR SUKOHARJO”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo?
2. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum yang timbul antara kedua belah, pihak apabila salah satu tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum yang timbul, antara kedua belah pihak apabila salah satu tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur mengenai perjanjian kredit jual beli.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca / masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

3. Bagi Penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang menyangkut hukum perjanjian kredit jual-beli.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian adalah salah satu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari tanggungjawab hukum perkara wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukum atau legalitas mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor yang berlaku di Putra Utama Motor Sukoharjo. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan mengenai apa yang tertera pada perjanjian tersebut..

### **2. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena yang akan



diteliti adalah penelitian yang secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggungjawab hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan tanggungjawab hukumnya dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut :

##### 1) Bahan Hukum Primer

- KUH Perdata.
- Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34 / II / 80 Tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa .

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari data literature tentang perjanjian kredit dan tanggungjawab hukumnya, surat perjanjian kredit, dan faktur penjualan kendaraan bermotor yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti. Dengan sumber data-data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press 1986, hal 12

data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Putra Utama Motor Sukoharjo.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah pimpinan atau staf yang bisa memberi penjelasan secara jelas mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor dan tiga orang pembeli kendaraan bermotor secara kredit di Putra Utama Motor Sukoharjo.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Study Kepustakaan

Study kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun kelima bahan yang disebutkan di atas serta buku- buku yang berhubungan dengan penelitian dalam

masalah tanggungjawab hukum dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Data – data tersebut kemudian diinventarisasi untuk dipelajari serta dikutip untuk membantu dalam menyusun skripsi ini.

b. Study Lapangan

Study lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Putra Utama Motor.

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkopoten dalam suatu permasalahan.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemimpin Putra Utama Motor atau staf yang yang bisa memberi penjelasan tentang masalah yang diteliti dan tiga orang pembeli kendaraan mermotor secara kredit di Putra Utama Motor Sukoharjo.

3) Quota Sampling

Quota Sampling yaitu proses penarikan sample untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan. Jadi criteria

---

<sup>6</sup> Sugiarto, Teknik Sampling, Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2001. Hal 17

pengambilan sample adalah hanya ditujukan kepada orang atau pihak yang dapat menjelaskan mengenai tanggungjawab hukum perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dengan demikian peneliti lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari pengambilan data tersebut.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi peraturan – peraturan hukum dan literature yang ada hubungannya dengan tanggungjawab dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

## BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Kendaraan Bermotor
- B. Pengertian Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor
- C. Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
- D. Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
- E. Hubungan antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
- F. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
- G. Tanggungjawab Hukum yang Timbul dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor.
- H. Berakhirnya Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian.

1. Proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra utama Motor Sukoharjo.
2. Hak dan kewajiban yang timbul bagi kreditur dan debitur dengan adanya perjanjian kredit di Putra Utama Motor Sukoharjo.
3. Tanggungjawab hukum yang ada dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.

B. Pembahasan.

1. Proses pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra utama Motor Sukoharjo.
2. Hak dan kewajiban yang timbul bagi kreditur dan debitur dengan adanya perjanjian kredit di Putra Utama Motor Sukoharjo.
3. Tanggungjawab hukum yang ada dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor di Putra Utama Motor Sukoharjo.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran